#### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA OLEH BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN ADVOKASI PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUKABUMI

#### Oleh :Widyani Rahayu \*)

**NPM. 158010051**

**ABSTRAK**

##### Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan kebijakan tentang program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) oleh Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang menitikberatkan pada Kajian implementasi Kebijakan Tentang Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) di Kabupaten Sukabumi yaitu Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021.Hasil penelitian bahwa pelaksanaan prgram Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang terintegrasi pada Kampung KB terus berkembang. (1) ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan telah direalisasikan diperkuat dengan surat edaran Bupati dan Pedoman pelaksanaan Program Kampung KB. (2) Sumber kebijakan meliputi dana dalam pelaksanaan program Kampung KB ditunjang oleh APBN dan Alokasi Dana Desa. (3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan dilaksanakan dengan jelas, akurat dan konsisten namun terkendala oleh ego sektoral masing-masing SKPD. (4) Karakteristik badan-badan pelaksana; kemampuan staf/pegawai masih rendah karena motivasi yang kurang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. (5) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik; pembinaan dan sosialisasi terus dilaksanakan. Karena kondisi ekonomi masyarakat pada umumnya masih rendah. (6) Kecenderungan para pelaksana; penegtahuan staf/pelaksana teknis di lapangan memiliki kesadaran untuk melaksanakan tupoksinya.Selanjutnya penelitian ini disimpulkan bahwa belum optimalnya kinerja Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut Usia pada Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi karena sumber-sumber ketersediaan dana operasinal yang belum sepenuhnya memadai untuk melaksanakan kegiatan program, Karakteristik Badan Pelaksana mengenai kemampuan staf/petugas yang masih perlu ditingkatkan dalam melaksanakan tupoksinya, juga kondisi sosial, ekonomi dan politik terutama mengenai pemahaman masyarakat mengenai program pemberdayaan ini masih perlu pembinaan yang terus menerus harus dilakukan secara intensif.

##### Kata Kunci : Implementasi, Keluarga Berencana, Kampung Keluarga Berencana

ABSTRACT

*The main problem in this research is the implementation of the policy on Family Planning (KB) program by Family Welfare and Advocacy Division at the Sukabumi District Population and Family Planning Control Office, still not optimal. This research uses qualitative approach with descriptive method which focuses on the Implementation Study of Policy About Family Planning Village Program (Kampung KB) in Sukabumi District is Regional Regulation No. 04 of 2016 on Medium Term Development Plan (RPJMD) Sukabumi District 2016-2021.Results of research that the implementation of the program Population, Family Planning and Family Development integrated in Kampung KB continues to grow. (1) the basic measures and policy objectives have been realized reinforced by the Circular Letter and Guidelines for the implementation of the Kampung KB Program. (2) Sources of policy include funding in the implementation of Kampung KB program supported by APBN and Allocation of Village Funds. (3) Inter-organizational communication and implementation activities are carried out clearly, accurately and consistently but constrained by sectoral ego of each SKPD. (4) Characteristics of implementing agencies; the ability of staff / staff is still low because of lack of motivation in carrying out the main tasks and functions. (5) Economic, social and political conditions; coaching and socialization continue to be implemented. Because the economic condition of society in general is still low. (6) Trend of executors; the knowledge of the staff / technical practitioners in the field have the awareness to implement tupoksinya.Selanjutnya this research concluded that not yet optimal performance Seksi Bina Family Resilience, Toddler, Child, Youth and Elderly in Family Prosperous Field and Advocacy Office of Population and Family Planning Sukabumi Regency because source - the availability of operasinal funds that are not yet sufficient to implement the program activities, the Implementing Body Characteristics regarding the ability of staff / officers who still need to be improved in implementing their tupoksinya, also social, economic and political conditions, especially about the community's understanding of the empowerment program must be done intensively.*

*Keywords: Implementation, Family Planning, Family Planning Village*

1. **Latar Belakang Penelitian**

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk. Salah satu tujuan pokok dalam program Keluarga Berencana Nasional adalah menghimpun dan mengajak segenap potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurut Saefudin (2013), mengatakan bahwa Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, dan harmonis.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai instansi pemerintah non departemen yang mengurus program Keluarga Berencana, mengalami perubahan kelembagaan, visi dan misi berdasarkan Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-undang tersebut mengamanatkan perubahan kelembagaan, yang semula adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Selain itu lembaga tersebut tidak hanya menangani program Keluarga Berencana semata, akan tetapi menangani masalah kependudukan dengan visi “Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas” dan misinya adalah “Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera” menggantikan visi sebelumnya yaitu “Seluruh Keluarga Ikut Keluarga Berencana” dan misi “Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”.

Sejalan dengan perkembangan era otonomi daerah (era desentralisasi) maka pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana cenderung kurang menguntungkan terutama pada aspek pengendalian jumlah penduduk, sedangkan perhatian pada kualitas penduduk seperti program pengentasan kemiskinan, kesehatan dan pendidikan cenderung meningkat, padahal menurut International Conference Population and Development (ICPD) 1994 Cairo, isu kuantitas dan kualitas penduduk harus ditangani secara simultan karena peningkatan kualitas penduduk tidak mungkin dapat dilakukan tanpa mengendalikan jumlah penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diikuti oleh pengendalian jumlah penduduk tidak akan banyak berarti bagi kesejahteraan masyarakat. Peran aktif masyarakat untuk memahami dan mengikuti program Keluarga Berencana mengalami penurunan.

Sesuai dengan Keppres nomor 09 tahun 2004 tentang penyerahan sebagian urusan di bidang keluarga berencana kepada pemerintah kabupaten dan kota maka eksistensi kelembagaan keluarga berencana nasional di daerah pun mengalami perubahan kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen. Berdasarkan pasal 54 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 52 tahun 2009, pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD di tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya memiliki hubungan fungsional dengan BKKBN.

Pada perkembangannya di tahun 2015, ketentuan pasal 54 ayat (1) Undang-undang nomor 52 tahun 2009 mengalami revisi penyesuaian dan amandemen dengan keluarnya ketentuan pasal 407 Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa; pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-undang ini. Dengan demikian, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah, berbentuk Dinas yang lebih tepatnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Selanjutnya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 217 ayat 3 Undang-undang nomor 23 tahun 2014, bahwa penentuan beban kerja pada dinas yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan keuangan daerah untuk urusan pemerintahan wajib dan berdasarkan potensi serta proyeksi.

Dalam upaya perwujudan program pelaksanaan agenda prioritas pembangunan no. 3,5, dan 8 tahun 2015-2019 (NawaCita) yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dan melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kurikulum pendidikan; penguatan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), serta menggairahkan kembali pelaksanaan program Keluarga Berencana di Indonesia, maka pemerintah melalui BKKBN membuat suatu gebrakan melalui Pembentukan Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) yang dicanangkan Presiden Jokowi pada tanggal 14 Januari 2016, di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Waluya Bondet, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

 Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) merupakan Program yang dikelola serta dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) yaitu Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut Usia Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi yang dibantu Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) dan diikuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat sebagai bentuk program yang inovatif dan strategis di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang bekerjasama secara terpadu dan terintegrasi yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

Pelaksanaan kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana selain menuntut peran aktif dari instansi pemerintah di tingkat Lini Lapangan (Kecamatan, Desa/Kelurahan, dusun/RW, dan RT) yang melibatkan unsur-unsur Institusi Masyarakat Pedesaan (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/PPKBD, SUB PPKBD, Kelompok Akseptor) dan kelompok-kelompok kegiatan (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) juga peran aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.

Pembangunan nasional di bidang kependudukan lebih diarahkan pada upaya pengembangan sumber daya manusia agar penduduk menjadi kekuatan yang efektif dan produktif bagi pembangunan. Penduduk dengan jumlah yang besar dan berkualitas adalah salah satu modal pembangunan nasional. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal dalam pembangunan nasional bila kualitasnya dikatakan baik, sebaliknya penduduk yang besar tetapi kualitasnya rendah hanya akan menjadi beban bagi pembangunan itu sendiri.

Dalam hal ini, pemerintah mengusahakan adanya peningkatan keterpaduan dan koordinasi upaya pengendalian kelahiran dengan berbagai kegiatan pembangunan lainnya. Khususnya pembangunan di bidang kesehatan, transmigrasi, pengendalian urbanisasi, pendidikan, dan pembangunan daerah serta penciptaan lapangan kerja. Jika dilihat dari segi kuantitas, menurut Badan Pusat Statistik, sampai tahun 2016 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 258,7 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49%. Hal itu menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia masih tinggi.

Pada hakikatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya serta pembangunan seluruh masyarakat. Menurut Koentjaraningrat (1982:32) bahwa dalam pembangunan nasional, manusia adalah titik sentral. Hal ini berarti bahwa seluruh kegiatan pembangunan nasional haruslah diarahkan pada peningkatan harkat dan martabat bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, ditetapkannya kebijakan tentang Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan program KKBPK secara paripurna yang menjadi model atau miniatur pembangunan di level mikro yang melibatkan seluruh sektor di masyarakat. Hasil akhir dari pelaksanaan kebijakan ini tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang memiliki ketahanan dan kesejahteraan yang lebih baik dalam rangka mewujudkan keluarga kecil sejahtera dan berkualitas baik dari segi jumlah dan pola kehidupan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Menurut Winarno (2014:37) apabila suatu program kebijakan tidak diimplemetasikan, hanya akan menjadi catatan-catatan elite saja. Hal tersebut dipertegas oleh pendapat Agustino (2016:129) yang menyatakan implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan merupakan tahap merealisasikan tujuan-tujuan program, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang diserahi tugas untuk melaksanakan program (Keban, 2004:72-73). Menurut Tachjan (2008:24-25), implementasi kebijakan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui, terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Kegiatan ini merupakan suatu sistem yang terdiri dari unsur-unsur dan kegiatan-kegiatan yang terarah menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

Mengacu kepada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat nomor 843.4/20/Yan Bangsos tentang Penguatan Keberadaan Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten/Kota se- Jawa Barat, maka Kabupaten Sukabumi sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat mengimplementasikan kebijakan program Kampung Keluarga Berencana sesuai surat edaran Bupati Sukabumi nomor 465/2045/DPPKB tentang Penguatan Keberadaan Kampung Keluarga Berencana di Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi. Pada tahun 2011, DPPKB Kabupaten Sukabumi telah terlebih dahulu membentuk Kampung Keluarga Kecil Berkualitas (Kampung KKB). Hal itu sesuai dengan dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi nomor 11 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi tahun 2010-2015, Bab VII tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah poin ke-29 tentang Program Keluarga Kecil Berkualitas.

Sampai dengan tahun 2015 telah terbentuk Kampung KKB sebanyak 130 kampung dari 26 kecamatan. Pada tahun 2017 ini dengan telah dicanangkannya Kampung KB secara nasional serta program pembentukan Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) dari BKKBN Propinsi Jawa Barat maka dibentuklah Kampung KB di 47 kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Yang kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021. Dengan demikian bahwa Kampung Keluarga Kecil Berkualitas (Kampung KKB) merupakan cikal bakal lahirnya Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB).

DPPKB Kabupaten Sukabumi bekerjasama dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah terkait telah berupaya melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis dalam rangka percepatan penurunan laju pertumbuhan penduduk melalui dukungan kebijakan penganggaran yang seimbang terhadap pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kapasitas tenaga lini lapangan, dukungan sarana dan prasarana kerja, pemberian informasi secara lebih intensif dan integratif, membangun komitmen masyarakat dalam mendukung program Keluarga Berencana dan program-program yang berkaitan dengan kependudukan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung berjalannya program Kampung KB, sumber dana yang didapat dan dialokasikan yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Alokasi Dana Desa (ADD).

 Pelaksanaan kebijakan tentang program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) oleh Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, masih belum optimal, terlihat dari :

1. Masih tinggi dan bervariasinya jumlah pasangan usia subur yang ingin menunda punya anak atau tidak menginginkan anak lagi tapi tidak ber-KB (*unmetneed*) yang tersebar di 47 kecamatan se-Kabupaten Sukabumi, Sampai bulan Nopember 2017 rata-rata jumlah *unmetneed* sebesar 13,85 %. Sedangkan jumlah *unmetneed*  yang diharapkan sebesar kurang dari 10 %. Unmetneed sangat bervariasi antar kecamatan, terendah sebesar 7,32 % di Kecamatan Cikidang, dan tertinggi di Kecamatan Jampangkulon sebesar 20,26 %. Hal ini disebabkan oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat kabupaten Sukabumi yang ditandai dengan rendahnya pemahaman terhadap manfaat penggunaan alat kontrasepsi.
2. Belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan, dan kemandirian peserta KB. Masih adanya pasangan usia subur yang menjadi Kelompok Kegiatan baik Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) maupun Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL) yang belum seluruhnya ber-KB. Hal ini disebabkan karena terbatasnya ketersediaan dana operasional dan masih kurang optimalnya kemampuan pengetahuan petugas pelaksana di lapangan dalam melakukan tugas pokoknya mensosialisaikan program kepada masyarakat. Sehingga berdampak terhadap rendahnya pengetahuan dan kesadaran Pasangan Usia Subur dan remaja tentang pentingnya melaksanakan program KB dan kesehatan reproduksi. Seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1

HASIL PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | KEGIATAN | BKB | BKR | BKL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah poktan yang melapor | 1.621 | 502 | 482 |
| 2 | Keluarga yang menjadi anggota poktan | 64.552 | 30.518 | 20.753 |
| 3 | Keluarga yang hadir dalam pertemuan | 50.788 | 23.590 | 16.134 |
| 4 | % keluarga yang hadir dalam pertemuan | 78,68 | 77.30 | 77,74 |
| 5 | Rata-rata jumlah keluarga yang hadir dlm pertemuan | 31,33 | 46,99 | 33,47 |
| 6 | Jumlah pertemuan/penyuluhan | 1.570 | 502 | 469 |
| 7 | Rata-rata jumlah pertemuan | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Jumlah anggota kelompok kegiatan berstatus PUS | 51.977 | 22.549 | 11.283 |
| 9 | Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan yang ber-KB | 42.804 | 18.631 | 8.005 |

Sumber : Hasil penelitian tahun 2018

1. Jumlah peserta KB aktif mandiri sampai dengan bulan Nopember 2017 sebanyak 103.754 pasangan atau sekitar 28,24 % dari peserta KB Aktif sebanyak 365.048 pasangan. Hal ini lebih disebabkan oleh karakter badan pelaksana di lapangan yang masih perlu ditingkatkan peran dan kemampuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berbentuk komunikasi, informasi dan edukatif sehingga masyarakat mau berperan aktif menjadi perserta KB yang aktif mandiri.

 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Implementasi Kebijakan tentang Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) oleh Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi”.**

* 1. **Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka fokus penelitian yang diambil peneliti adalah kajian Implementasi Kebijakan tentang Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) oleh Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi. Kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021, tentang Program Kampung Keluarga Berencana yang secara teknis diperkuat dengan Surat Edaran Bupati nomor 465/2045/DPPKB mengenai Penguatan Keberadaan Kampung Keluarga Berencana di Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu peneliti mengkaji bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi nomor 04 tahun 2016 oleh Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, akan dibahas melalui indikator dalam proses implementasi kebijakan yang terdiri dari : Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan; Sumber-sumber kebijakan; Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; Karakteristik badan-badan pelaksana; Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik; Kecenderungan para pelaksana.

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti mengemukakan pernyataan masalah (problem statement) mengenai Implementasi Kebijakan tentang Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) oleh Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi menuju Keluarga Kecil Sejahtera dan Berkualitas masih belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti merumuskan masalah :

* + 1. Bagaimana Implementasi Kebijakan tentang Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) oleh Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi ?
		2. Model implementasi kebijakan yang tepat dilaksanakan oleh Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi untuk meningkatkan keberhasilan Program Kampung Keluarga Berencana.
	1. **Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**
		1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1) Mengetahui sudah sejauhmana Implementasi Kebijakan tentang Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) oleh Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi ?

2) Mengetahui model implementasi kebijakan yang tepat dilaksanakan oleh Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi untuk meningkatkan keberhasilan Program Kampung Keluarga Berencana.

* + 1. **Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan penelitian di atas, kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

* + - 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian Ilmu Administrasi Publik dalam kaitannya dengan konsep dan teori Implementasi Kebijakan.

* + - 1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan bahan masukan mengenai pentingnya Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sukabumi yang terintegrasi dalam sebuah Kebijakan berupa Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) yang dilaksanakan oleh Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi untuk mewujudkan Keluarga Kecil Sejahtera dan Berkualitas di Kabupaten Sukabumi khususnya dan di Jawa Barat pada umumnya, sesuai dengan agenda prioritas Nawacita nomor 3,5 dan 8 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dan melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kurikulum pendidikan.

1. **Kerangka Berpikir**

 Untuk menyelesaikan masalah penelitian tentang implementasi kebijakan publik, peneliti perlu mengacu pada teori dan faktor-faktor implementasi kebijakan publik, sebagai landasan dalam menyusun kerangka berpikir.

Menurut Wahab (2017:152-153) mengatakan bahwa pakar analisis kebijakan kerap mempergunakan alat-alat konseptual tertentu berupa model-model untuk membantu memvisualisasikan realita implementasi kebijakan yang kompleks untuk memahami dan menganalisis proses implementasi kebijakan publik.

Sejalan dengan pendapat menurut Sabatier (1979) dalam Wahab (2017:135) mengatakan bahwa Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, mencakup baik usaha-usaha untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Adapun tingkat keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Grindle dalam Alamsyah (2016 : 86-87) dipengaruhi oleh :

1. Isi kebijakan (*content of policy*), yang mencakup kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan; jenis manfaat yang dihasilkan; derajat perubahan yang diinginkan; kedudukan pembuat kebijakan; para pelaksana program; sumber daya yang dikerahkan;
2. Konteks implementasi, yang mencakup kekuasaan; kepentingan strategi aktor yang terlibat; karakteristik lembaga dan penguasa; kepatuhan dan daya tanggap pelaksana.

Model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn (Winarno, 2014:158-174) menawarkan suatu model implementasi kebijakan publik yang terdiri dari enam indikator yang membentuk ikatan antara kebijakan dan pencapaian tujuan kebijakan (*performance)* yang dikenal sebagai model proses implementasi kebijakan. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Adapun indikator tersebut akan dijadikan istrumen untuk menganalisis data dan fakta dalam penelitian ini, terdiri dari :

a. Ukuran dan tujuan kebijakan : Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan harus dapat diidentifikasi dan diukur, karena pelaksanaan tidak dapat dinyatakan sukses atau gagal sebelum dihadapkan dengan tujuan sebagai alat ukurnya. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauhmana ukuran-ukuran dasar (standar) dan tujuan-tujuan (sasaran) kebijakan telah direalisasikan. Identifikasi untuk menentukan ukuran-ukuran (standar) dari sasaran-sasaran kebijakan, dapat menggunakan pernyataan-pernyataan para pembuat keputusan yang direfleksikan dalam bentuk dokumen, regulasi, dan program yang menyatakan kriteria untuk evaluasi pencapaian kebijakan.

b. Sumber Daya Kebijakan : Sumber-sumber kebijakan merupakan salah satu penunjang terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber kebijakan yang dimaksud dapat menunjang keberhasilan implementasi kebijakan meliputi dana atau insentif lainnya dalam program yang dapat mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Besar kecilnya dana yang tersedia akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

c. Karakteristik Agen Pelaksana : Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang, dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Karakterisktik badan administratif yang dianggap berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam rangka implementasi kebijakan. Beberapa ciri penting yang mungkin dianggap berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, terutama berkaitan dengan kemampuan dan ukuran staf suatu badan, tingkat pengawasan berjenjang terhadap keputusan dan proses di dalam badan-badan pelaksana. Daya dukung politik terhadap organisasi (dukungan diantara legislatif dan eksekutif).

d. Sikap/ Kecenderungan para Pelaksana : Identifikasi yang dilakukan terhadap sikap para pelaksana kebijakan, dapat dikaji dari tiga unsur tanggapan yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yaitu : kognisi (komprehensif, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan para pelaksana (penerimaan, netralitas, penolakan), dan intensitas tanggapan itu. Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar, dan tujuan-tujuan kebijakan-kebijakan merupakan satu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Kegagalan pelaksanaan kebijakan seringkali diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan.

e. Komunikasi Antar Organisasi Terkait : Kejelasan standar dan sasaran implementasi, menjadi pusat perhatian dalam proses komunikasi di antara para pelaksana kebijakan. Implementasi kebijakan yang efektif membutuhkan informasi yang dinyatakan secara jelas, akurat dan konsisten dari berbagai sumber informasi, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan program. Sehingga informasi mengenai standar (ukuran) dan sasaran dari program kebijakan mudah difahami oleh individu-individu baik dalam organisasi maupun antar organisasi terkait yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan. Pada hubungan-hubungan antar organisasi terkait, maupun antar pemerintah, perlu memberikan nasihat dan bantuan teknis kepada pejabat di bawahnya. Pejabat tingkat tinggi seringkali dapat memberikan banyak hal untuk memperlancar implementasi kebijakan dengan jalan membantu pejabat-pejabat bawahannya menginterpretasikan peraturan-peraturan dan garis-garis pedoman pemerintah, menstrukturkan inisiatif-inisiatif dan memperoleh sumber-sumber fisik dan teknis yang diperlukan dan berguna dalam memperlancar pelaksanaan kebijakan. Atasan dapat menyandarkan pada berbagai sanksi baik positif maupun negatif.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik : Dampak kondisi sosial, ekonomi dan politik terhadap kebijakan publik menjadi pusat perhatian pada saat ini. Para peminat kebijakan publik mengidentifikasi pengaruh variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan. Sekalipun, dampak dari faktor kondisi sosial, ekonomi dan politik terhadap implementasi kebijakan mendapat perhatian yang relatif kecil, namun kondisi ini mempunyai dampak yang mendalam terhadap pencapaian tujuan badan-badan pelaksana kebijakan. Beberapa pertimbangan berkaitan dengan lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, yaitu : 1) apakah sumber-sumber ekonomi organisasi pelaksana kebijakan cukup mendukung keberhasilan implementasi; 2) bagaimana kondisi ekonomi dan sosial dapat dipengaruhi oleh implementasi kebijakan bersangkutan; 3) bagaimana pendapat masyarakat terhadap isu kebijakan yang akan dilaksanakan; 4) apakah elit-elit mendukung atau menentang implementasi kebijakan; 5) apakah sifat-sifat pengikut dari yurisdiksi atau organisasi pelaksana, dan apakah ada oposisi atau dukungan bagi kebijakan; 6) sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan swasta dimobilisasi untuk mendukung atau menentang kebijakan.

Berdasarkan karakteristik kebijakan yang akan diteliti, menurut peneliti model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn (Winarno, 2014 : 158-174) ini merupakan model yang paling mendekati dan relevan untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian, sesuai dengan fenomena yang ditemukan di lapangan. Sehingga peneliti dapat merumuskan unsur-unsur yang terkait dalam struktur kerangka berpikir penelitian. Berikut gambar model implementasi Van Metter dan Van Horn :

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan

KEBIJAKAN

Kinerja

Standar dan tujuan kebijakan

Ciri-ciri badan pelaksana

Sikap para pelaksana

Sumber-sumber kebijakan

Lingkungan : ekonomi, sosial, dan politik

Gambar 1 Model Proses Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menyusun kerangka berpikir sebagai berikut:

Kebijakan Publik :

-Perda Nomor 4 tahun 2016

-Surat Edaran Bupati nomor 465/2045/DPPKB

-Pedoman Pelaksanaan Kampung KB

Implementasi Kebijakan dan Proses Implementasi Kebijakan :

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan;
2. Sumber-sumber kebijakan;
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan;
4. Karakteristik badan-badan pelaksana;
5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik;
6. Kecenderungan para pelaksana

Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2014 : 109-119)

1. Meningkatnya kesertaan ber-KB pasangan usia subur
2. Menurunkan laju pertumbuhan penduduk
3. Meningkatkan kualitas pengetahuan dan pelayanan petugas lapangan di kampung KB

Gambar 2 Bagan Kerangka Berpikir

Output :

meningkatkan kualitas hidup manusia di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nawawi dalam Satibi (2011:76-77) metode deskriptif diterjemahkan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Selain itu Nazir (1988: 63)  [mengatakan bahwa](http://idtesis.com/contoh-proposal-metode-penelitian-hukum/)  metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Lebih jauh Satibi mengemukakan (2011:77) mengemukakan bahwa metode deskriptif sesungguhnya tidak hanya sebatas menemukan dan mengumpulkan data atau informasi semata, tetapi juga melakukan analisis dan interpretasi terhadap data atau informasi secara komprehensif, sehingga diperoleh suatu makna yang signifikan dalam memecahkan masalah yang diteliti.

Adapun menurut Sugiyono (2005: 21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Pendekatan kualitatif dipilih karena pada penelitian ini peneliti terlibat langsung dalam pengumpulan data. Penggunaan pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh data yang sebenar-benarnya dan masalah penelitian dapat dikaji secara mendalam dan menyeluruh, sehingga dapat diperoleh hasil yang diharapkan.

Pendapat lain mengenai penelitian kualitatif dikemukakan oleh Sukmadinata (2006:5), bahwa dasar penelitian kualitatif merupakan konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Menurut Danim (2002) mengatakan bahwa Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran ialah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka. Sejalan dengan hal tersebut menurut Creswell (2014:167), tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian.

Berdasarkan uraian di atas penggunaan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang sedang terjadi secara menyeluruh terkait fokus penelitian peneliti yaitu Implementasi Kebijakan tentang Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) menuju Keluarga Kecil Sejahtera dan Berkualitas di Kabupaten Sukabumi.

1. **Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data yang diperoleh dalam mengungkapkan fenomena yang dijadikan obyek penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti pada saat melakukan penelitian melalui wawancara mendalam dengan subyek penelitian atau informan dan pengamatan langsung di lapangan (observasi).

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran yang berasal dari kajian literatur dan dokumen terkait, melalui studi kepustakaan dan studi dokumen yang dapat menerangkan berbagai masalah terkait dengan obyek penelitian sebagai fungsi pendukung terhadap data primer. Data sekunder ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan implementasi Kebijakan tentang Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB), informasi-informasi dari artikel, jurnal, dokumen, data statistik, baik dari fihak pemerintah maupun masyarakat, serta publikasi media massa yang mempunyai hubungan dengan obyek peneliti.

Adapun Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan menggunakan teknik *Snowball Sampling.* Menurut Satibi (2011:92) menyatakan bahwa Teknik *Snowball Sampling* adalah :

Teknik pengumpulan data dimulai dari beberapa orang yang dianggap memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai anggota sampel. Mereka kemudian menjadi sumber informasi tentang orang-orang lain yang memenuhi kriteria juga dapat dijadikan sebagai anggota sampel sampai jumlah anggota sampel yang diinginkan terpenuhi.

Dengan teknik pengumpulan data tersebut di atas, diharapkan informasi yang diperoleh dapat mendukung data yang diperlukan selama penelitian di lapangan berlangsung. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi hal-hal yang masih belum jelas dalam penelitian pendahuluan. Ditujukan untuk mendapatkan gambaran data yang lebih tepat dan akurat.

1. **Teknik Penentuan Informan**

Penentuan Informan dalam penelitian ini didasarkan pada kriteria sesuai dengan tujuan penelitian. Hal itu disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif. Informan ditentukan atas pertimbangan bahwa mereka dianggap mengetahui dan dapat memberikan data serta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan implementasi Kebijakan Program tentang Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) di Kabupaten Sukabumi.

Sebagai tahap awal, peneliti memilih :

1. Sebagai *key informan* adalah Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi
2. Informan :
3. Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Baliat, Anak, Remaja dan Lanjut Usia
4. Petugas Lapangan Keluarga Berencana
5. Camat
6. Masyarakat yang ditunjuk dalam kepengurusan Kampung Keluarga Berencana

Setelah dilakukan wawancara mendalam pada saat penelitian, pemilihan informan kemungkinan akan berkembang sesuai dengan arahan informan utama berdasarkan keterlibatan instansi pemerintah lain dalam Implementasi Kebijakan tentang Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) menuju Keluarga Kecil Sejahtera dan Berkualitas pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi.

1. **Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian dengan pendektan kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, dimana sebagai instrumen penelitian, peneliti harus divalidasi mengenai kesiapan peneliti untuk melakukan penelitian dan selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti yaitu Kebijakan tentang Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) menuju Keluarga Kecil Sejahtera dan Berkualitas, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Validasi mengenai hal-hal tersebut dilakukan oleh peneliti itu sendiri.

1. **Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Nasutin dalam Sugiyono (2005:89) yang menyatakan bahwa analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah,sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penelitian hasil yang diteliti. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang digrounded. Selanjutnya menurut Sugiono (2015:90) mengemukakan pula bahwa dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, teknis analisis data menggunakan model deskriptif kualitatif berdasarkan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2005:91-99), meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Data lapangan dari lokasi penelitian dituangkan ke dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan kemudian direduksi, dirangkum dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atu polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data dilaukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

1. Penyajian Data

Penyajian data (display data) dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data peneliti. Hal ini merupakan pengorganisasian data ke dalam suatu bentuk tertentu (tabel, gambar atau grafik) sehingga kelihatan jelas sosoknya yang lebih utuh. Data tersebut kemudian dipilah-pilah menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan katagori yang sejenis untk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu penyajian data dan reduksi.

1. Penarikan Kesimpulan (verifikasi)

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus menerus, maka diperoleh kesimpulan yang bersifat *grounded.*

Melalui ketiga tahapan analisis tersebut, maka setiap kesimpulan selalu dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti. Analisis data merupakan suatu kegiatan yang logis, data kualitatif berupa pandangan-pandangan tertentu terhadap fenomena yang terjadi dalam implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB).

1. **Validitas Data**

Menurut Sugiyono (2005:117) mengemukakan bahwa hasil penelitian dikatakan valid, apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan cara triangulasi. Menurut Wiersma dalam Sugiyono (2015:125-128), triangulasi merupakan proses pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, sehingga terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu sebagai berikut :

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda.

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama, dengan teknik yang berbeda, misalnya observasi, dokumentasi, atau kuesioner.

1. Triangulasi Waktu

Triangulasi Waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, karena waktu pengambilan data juga sering mempengaruhi kredibilitas data.

1. **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**4.1. Hasil Penelitian**

**4.1.1. Gambaran Umum Program** **Kampung Keluarga Berencana pada Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi**

Pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Sukabumi, didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi dan Surat Edaran Bupati Sukabumi nomor 465/2045/DPPKB tentang Penguatan Program Kampung Keluarga Berencana (KB). Pada tahun 2011, Kabupaten Sukabumi telah terlebih dahulu membentuk Kampung Keluarga Kecil Berkualitas (Kampung KKB). Sampai dengan tahun 2015 telah terbentuk Kampung KKB sebanyak 130 kampung dari 26 kecamatan. Pada tahun 2016 dengan telah dicanangkannya Kampung KB secara Nasional oleh Presiden Jokowi pada tanggal 14 Januari 2016 di Cirebon, maka telah dibentuk 47 Kampung KB di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) melibatkan seluruh bidang yang ada di lingkungan DPPKB terutama menjadi tugas dan tanggungjawab Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut Usia pada bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya dengan memberikan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok-kelompok kegiatan baik Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lanjut Usia bekerja sama dengan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat, serta dilaksanakan di tingkat pemerintahan terendah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud adalah adanya keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

Selanjutnya akan dikemukakan mengenai keadaan pegawai dilihat dari jumlah pegawai pada Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi sebagai sumber daya aparatur yang memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan program keluarga berencana pada Kampung Keluarga Berencana.

Tabel 2

Data Jumlah Pegawai Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Unit Kerja | Jumlah |
| 1. | Kabid. Keluarga Sejahtera dan advokasi | 1 |
| 2. | Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera | 4 |
| 3. | Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut Usia | 4 |
| 4. | Seksi Advokasi dan Pergerakkan institusi Masyarakat | 4 |
|  | Jumlah | 13 |

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Untuk mendukung optimalisasi peran Kampung Keluarga Berencana di masing-masing desa sebagai basis pergerakkan pemberdayaan ketahanan keluarga dan pelestarian peserta Keluarga Berencana, Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi dibantu oleh petugas lini lapangan yang tersebar di 47 Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi, yaitu :

1. Kepala UPT DPPKB sebanyak 47 orang
2. Petugas Lapangan Keluarga Berencana sebanyak 96 orang
3. Tenaga Penggerak Desa sebanyak 109 orang
4. Tenaga Penggerak dan Penyuluh Desa sebanyak 202 orang

Upaya-upaya optimalisasi itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pengembangan Keluarga untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk yang hidup dalam lingkungan sehat. Dengan memiliki keluarga yang berkualitas, baik dari segi jumlah maupun dari segi pola kehidupan, diharapkan dapat menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas di masa yang akan datang. Dengan pertimbangan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari sebuah negara dan merupakan awal tempat belajar bagi anak sebagai generasi calon penerus bangsa.

Mengingat pentingnya pembangunan di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, maka identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis, sesuai tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, merupakan kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan pada lima tahun mendatang.

**4.1.2. Identifikasi Permasalahan Program Kampung Keluarga Berencana pada Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi**

Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam bentuk program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) selalu berpedoman kepada arah kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019 yang didukung oleh 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), BKKBN diharapkan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan Agenda Prioritas ke 3,5, dan 8 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dan melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kurikulum pendidikan.

Dalam partisipasinya mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, DPPKB Kabupaten Sukabumi dihadapkan pada berbagai masalah kependudukan dan pengembangan sumber daya manusia yang harus terus ditingkatkan, seperti diantaranya adalah :

1. Masih tinggi dan bervariasinya jumlah pasangan usia subur yang ingin menunda punya anak atau tidak menginginkan anak lagi tapi tidak ber-KB (unmetneed) yang tersebar di 47 kecamatan se-Kabupaten Sukabumi, Sampai bulan Nopember 2017 rata-rata jumlah unmetneed sebesar 13,85 %. Sedangkan jumlah unmetneed yang diharapkan sebesar kurang dari 10 %. Unmetneed sangat bervariasi antar kecamatan, terendah sebesar 7,32 % di Kecamatan Cikidang, dan tertinggi di Kecamatan Jampangkulon sebesar 20,26 %.
2. Belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan, dan kemandirian peserta KB. Masih adanya pasangan usia subur yang menjadi Kelompok Kegiatan baik Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) maupun Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL) yang belum seluruhnya ber-KB. Adapun hasil penelitian, dapat dilihat pada Tabel 1.1.
3. Jumlah peserta KB aktif mandiri sampai dengan bulan Nopember 2017 sebanyak 103.754 pasangan atau sekitar 28,24 % dari peserta KB Aktif sebanyak 365.048 pasangan.

Berdasarkan identifikasi masalah yang terdapat pada rencana strategis SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, maka misi yang menjadi beban Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut Usia pada bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi adalah untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesertaan ber-KB untuk Pasangan Usia Subur (PUS) Pra Keluarga Sejahtera (KS) dan KS 1 anggota kelompok usaha ekonomi produktif dari 80 persen menjadi 82 persen dan pembinaan keluarga menjadi 70 persen. Dengan tujuan untuk menguatkan akses pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang merata dan berkualitas, peningkatan pembinaan peserta KB baik menggunakan Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) maupun non MKJP dan meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Adapun Sasaran yang ingin dicapai yaitu menurunkan laju pertumbuhan penduduk (LPP), menurunkan angka kelahiran total (*TFR*) per Wanita Usia Subur (15-49), meningkatnya pemakaian kontrasepsi (*CPR)*, menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmetneed*), menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR15-19 tahun), menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari Wanita Usia Subur (15-49 tahun) dan meningkatnya tingkat kemandirian dalam kesertaan ber-KB sampai 30 % dari total peserta KB dengan cara modern.

**4.1.3. Isu-isu Strategis Pelayanan Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga pada Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Sukabumi**

Isu-isu strategis merupakan kumpulan persoalan yang dihadapi dan dinilai perlu diantisipasi dan/atau ditanggulangi dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga selama lima tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah :

1. Isu strategis dari dinamika internasional, nasional maupun regional yang menyangkut masalah Kependudukan.
2. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri dari :
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025.
4. Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi lingkungan, perilaku masyarakat, saran dan prasarana pelayanan kependudukan dan keluarga berencana, serta kemungkinan pengaruh lainnya.
5. Sasaran-sasaran pembangunan yang belum dapat dipenuhi pada masa RPJMD/target rencana strategis SKPD DPPKB sebelumnya.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sukabumi mempunyai kewenangan untuk merumuskan berbagai kebijaksanaan kependudukan dalam bidang kuantitas, kualitas, mobilitas, dan informasi kependudukan yang dipakai sebagai acuan bagi semua sektor pembangunan. Secara khusus, DPPKB mempunyai kewenangan untuk mengembangkan aksi sosial di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga serta pengembangan kuantitas penduduk dan keluarga melalui pemberdayaan keluarga dan pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Khusus mengenai isu strategis dan masalah mendesak Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga adalah sebagai berikut :

1. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi
2. *Total Fertility Rate* belum ,mendukung penduduk tumbuh seimbang
3. Kawin muda masih tinggi
4. Peran serta pria dalam ber-KB masih rendah
5. Aksesibilitas keluarga rentan terhadap pelayanan KB rendah
6. Perlu pengoptimalan mekanisme operasional lini lapangan
7. Implementasi komitmen Operasional Program Kependudukan, KB di tingkat lini lapangan belum optimal
8. Kecenderungan fertilitas keluarga miskin meningkat
9. Pendukungan anggaran yang masih terbatas

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pengembangan keluarga di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya dirumuskan mengenai visi, misi, tujuan, dan strategi, program kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi. Adapun untuk lebih jelasnya akan peneliti uraikan sebagai berikut :

1. **Visi**

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi umum dan pencapaian pembangunan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Kabupaten Sukabumi, potensi dan permasalahan serta lingkungan strategis baik internal maupun eksternal maka ditentukan Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, yaitu : Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Kecil Berkualitas Menuju Masyarakat Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri. Visi tersebut mengandung arti bahwa :

1. Penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan *Total Fertility Rate (TFR)* sebesar 2,1 yang berarti setiap Wanita Usia Subur memiliki 2 orang anak dan *Net Reproduction Rate (NRR)* sebesar 1 yang berarti setiap penduduk wanita akan digantikan oleh seorang anak wanita yang menggantikan posisi dirinya.
2. Mengandung dua elemen penting yaitu religius dan mandiri. Elemen religius pada intinya adalah melaksanakan pembangunan daerah melalui pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dengan tetap berpegang teguh pada moral dan ahlak sehingga terbentuk suatu kehidupan yang religius, harmonis, bermartabat dan berdaya saing. Selain itu religius mengandung makna toleransi. Toleransi merupakan suatu sikap sebagai umat beragama yang mempunyai keyakinan untuk menghormati dan menghargai manusia beragama lain. Sebab kabupaten Sukabumi dengan mayoritas penduduk beragama Islam harus memiliki toleransi terhadap pemeluk agama lain. Sehingga makna toleransi dalam pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana dapat diartikan sebagai pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat.
3. Sementara arti dari elemen mandiri merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai tujuan hidup dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. Pembangunan di bidang kependudukan memberikan penekanan pada peningkatan kualitas dan daya saing sebagai modal dasar dalam membentuk kemandirian setiap individu masyarakat Kabupaten Sukabumi. Kemandirian masyarakat juga ditekankan dalam hal “pemberdayaan” (*enpowerment).* Pada hakekatnya pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas dalam masyarakat berusaha mengontrol kehidupan dan mengusahakan membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Sehingga diharapkan mendorong masyarakat untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukan dalam kaitan mengatasi permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan kesadaran dan kekuasaan penuh untuk membentuk hari depannya.
4. **Misi**

Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menurunkan laju pertumbuhan penduduk
2. Meningkatnya kesertaan ber-KB pasangan Usia Subur (PUS) Pra Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) anggota kelompok usaha ekonomi produktif dari 80 persen menjadi 82 persen dan pembinaan keluarga menjadi 70 persen.
3. Meningkatkan Kualitas Data Mikro dan Informasi Keluarga.

Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, mengacu dan berpedoman pada misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025, dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat dan serasi antara misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Sukabumi, dengan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi, kemudian dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi.

**4.2. Pembahasan**

**4.2.1. Implementasi Kebijakan tentang Program Kampung Keluarga Berencana oleh Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi**

Analisis implementasi kebijakan publik pada penelitian ini akan dikaji berdasarkan teori yang telah diuraikan di dalam kajian pustaka dan kerangka berfikir penelitian. Alat analisisnya merujuk pada konsep dan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2014:109) yang tidak hanya menghubungkan antara variabel bebas dan variabel terikat, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dengan faktor-faktor sebagai berikut : Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan; sumber-sumber kebijakan; komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; karakteristik badan-badan pelaksana; kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik; dan kecenderungan para pelaksana.

Alat analisis yang dirujuk pada teori tersebut selanjutnya akan dibahas berdasarkan data dan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan, sesuai hasil observasi peneliti selama berada di lapangan dan wawancara mendalam, dengan beberapa informan yang dianggap dapat mewakili dan mampu memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dengan berpedoman pada daftar observasi dan wawancara yang telah dipersiapkan oleh peneliti sebagai panduan, sehingga peneliti mendapatkan informasi yang benar-benar terjamin dan dibutuhkan sesuai tujuan penelitian ini.

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan akan diidentifikasi dan diukur, bedasarkan indikator-indikator pencapaian dengan menilai sejauhmana ukuran-ukuran dasar (standar) dan tujuan-tujuan (sasaran) kebijakan, dapat menggunakan pernyataan-pernyataan para pembuat keputusan yang direfleksikan dalam bentuk dokumen, regulasi dan program yang menyatakan kriteria untuk evaluasi pencapaian kebijakan. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan publik tidak dapat dinyatakan sukses atau gagal sebelum dihadapkan dengan tujuan sebagai alat ukurnya.

Ukuran-ukuran Dasar (Standar) kebijakan telah terukur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 yang menjadi dasar pembentukan Kampung Keluarga Berencana. Ada beberapa peraturan lainnya yang juga dijadikan rujukan untuk pelaksanaan pembentukan Kampung KB di Kabupaten Sukabumi, diantaranya yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 110 tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2018
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat nomor 843.4/20/Yanbangsos tentang penguatan keberadaan kampung KB di kabupaten/Kota se-Jawa Barat
3. Surat Edaran Bupati Sukabumi nomor 465/2045/DPPKB tentang Penguatan Keberadaan Kampung KB di Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi.
4. **Sumber-sumber kebijakan**

Sumber-sumber kebijakan merupakan salah satu penunjang terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber kebijakan yang dimaksud dapat menunjang keberhasilan implementasi kebijakan meliputi dana atau insentif lain dalam program yang dapat mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Besar kecilnya dana yang tersedia akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa di dalam implementasi kebijakan proram Kampung Keluarga Berencana, ketersediaan dana menjadi penting mengingat luasnya wilayah operasional. Hal tersebut berpengaruh terhadap penggunaan anggaran yang tersedia pada penunjang kegiatan-kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) yang masih belum optimal pemanfaatannya dan pengawasan terhadap pemanfaatan alokasi dana program. Pelaksanaan program Kampung KB oleh Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut Usia ditunjang oleh Dana dari BKKBN Pusat yang bersumber dari dana APBN dan Alokasi Dana Desa.

1. **Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan**

Hasil observasi peneliti mengenai indikator-indikator komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan dalam implementasi kebijakan program Kampung KB di Kabupaten Sukabumi, dapat diketahui bahwa informasi pelaksanaan kebijakan program Kampung KB sudah konsisten dilaksanakan dan dibantu oleh petugas-petugas lini lapangan. Koordinasi yang dilakukan oleh Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut Usia dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sudah dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan. Walaupun masih ada perbedaan pemahaman yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan terhadap program yang dilaksanakan yang perlu ditingkatkan lagi diantara petugas lini lapangan dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah lainnya. Hal itu disebabkan karena pemahaman terhadap nama program Kampung Keluarga Berencana. Satuan Perangkat Kerja Daerah lainnya menganggap bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada kampung KB sebagian besar adalah menjadi tanggungjawab DPPKB sebagai pemegang kewenangan terhadap pelaksanaan program KB.

1. **Karakteristik badan-badan pelaksana**

Karakteristik badan-badan pelaksana kebijakan merupakan struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang, dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Karakterisktik badan pelaksana dianggap berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam rangka implementasi kebijakan. Beberapa ciri penting yang mudah dianggap berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, terutama berkaitan dengan kemampuan dan ukuran staf suatu badan. Oleh karena itu, tentang karakteristik badan-badan pelaksanan dalam implementasi kebijakan, dapat dianalisis melalui indikator : kemampuan staf/pegawai; jumlah staf/pegawai; pengawasan berjenjang; dukungan Satuan Perangkat Kerja Daerah terkait; upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas staf/pegawai guna mendukung pencapaian tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi mengenai kemampuan staf/pegawai pelaksana kebijakan pada seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut Usia, secara umum mereka mampu melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Namun masih ada spesifikasi teknis yang belum dikuasai atau belum dipahami betul oleh petugas lini lapangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

1. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik

Dampak kondisi sosial, ekonomi, politik terhadap kebijakan publik menjadi pusat perhatian pada saat ini. Para peminat kebijakan publik mengidentifikasi pengaruh vaiabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan. Sekalipun dampak dari faktor sosial, ekonomi dan politik terhadap implementasi kebijakan mendapat perhatian yang relatif kecil, namun kondisi ini mempunyai dampak yang mendalam terhadap pencapaian tujuan badan-badan pelaksana kebijakan.

Beberapa pertimbangan berkaitan dengan lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, yaitu : 1) bagaimana kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Sukabumi sehingga terlaksananya program Kampung Keluarga Berencana; 2) bagaimana pendapat masyarakat terhadap kebijakan program kampung KB; 3) apakah tokoh-tokoh elit masyarakat mendukung sepenuhnya atau memberikan penolakan terhadap implementasi kebijakan; 4) bagaimana pemahaman dan respon masyarakat terhadap kebijakan; 5) hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai kondisi sosial masyarakat perlu diberikan kembali pemahaman dan pembinaan melalui intensitas pertemuan-pertemuan atau pada kegiatan-kegiatan yang mudah dipahami oleh masyarakat sehingga tertarik untuk mengikuti program yang digulirkan.

1. **Kecenderungan para pelaksana kebijakan**

Kecenderungan para pelaksana merupakan identifikasi yang dilakukan terhadap sikap para pelaksana kebijakan, dapat dikaji dari tiga unsur tanggapan yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka melaksanakan kebijakan, yaitu : kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan para pelaksana (penerimaan, netralitas, penolakan), dan intensitas tanggapan itu. Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar, dan tujuan-tujuan kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Kegagalan pelaksanaan kebijakan seringkali diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan.Peneliti memberikan analisis bahwa kecenderungan badan pelaksana terhadap pemahaman pelaksanaan kebijakan tentang program Kampung KB masih perlu ditingkatkan. Hal itu terlihat dari ketaatan dan kepatuhan petugas lapangan dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai tugas pokok dan fungsinya yang sangat bervariatif. Sesuai dengan teori dan hasil wawancara di atas, maka peneliti memberikan penguatan bahwa dengan ketaatan dan kepatuhan para pelaksana lapangan cukup baik terhadap pelaksanaan kebijakan sangat mempengaruhi pemahaman masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program kebijakan sesuai dengan harapan yang diinginkan.

**4.2.2. Model Implementasi Kebijakan yang tepat tentang Program Kampung Keluarga Berencana oleh Bidang Kesejahteraan Keluarga dan Advokasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021 yang diperkuat dengan Surat Edaran Bupati Nomor 465/2045/DPPKB tentang penguatan keberadaan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Sukabumi dan Pedoman Pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana yang menjadi dasar pelaksanaan implementasi Kebijakan tentang program Kampung Keluarga Berencana Oleh Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut Usia pada Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi DPPKB Kabupaten Sukabumi, masih terdapat permasalahan yang menjadi kendala kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan program kampung KB. Hal ini dapat dilihat pada indikator-indikator sebagai berikut :

1. Faktor Sumber-sumber Kebijakan

Berdasarkan Sumber-sumber kebijakan yang dimaksud adalah ketersediaan biaya operasional sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi para petugas lini lapangan dalam implementasi kebijakan program kampung KB kepada masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga yang berasal dari Dana Alokasi Khusus yaitu Alokasi Dana Desa. Mengingat cukup luasnya jangkauan wilayah kerja para petugas lini lapangan, tentunya membutuhkan biaya operasional yang disesuaikan dengan jarak dan waktu tempuh bagi para petugas lini lapangan untuk menjangkau daerah sasaran kebijakan program. Peneliti menginterpretasikan bahwa pengelolaan dan pengawasan terhadap penggunaan ketersediaan dana operasional masih perlu ditingkatkan lagi mengingat pentingnya pengaruh terhadap motivasi kerja di lapangan.

1. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Sesuai data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian dan data primer hasil observasi peneliti, wawancara dengan informan, peneliti menganalisis berkaitan dengan faktor komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan dengan indikator : informasi program jelas, akurat dan konsisten; standar dan sasaran mudah dipahami; bantuan teknis bawahan; mendorong inisiatif bawahan; langkah-langkah penerapan kebijakan. Peneliti menafsirkan bahwa secara umum dimensi komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sudah berjalan cukup baik. Namun demikian ada juga kendala yang timbul dari petugas di lapangan yang terkadang memberikan tanggapan negatif karena kurang pemahaman berupa program pemberdayaan. Masih terdapat egoisme sektoral di antara SKPD terkait.

1. Karakteristik Badan Pelaksana

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap indikator-indikator Karakteristik Badan Pelaksana pada proses implementasi kebijakan Kampung KB, terutama indikator kemampuan staf/pegawai petugas lini lapangan, masih perlu ditingkatkan. Hal itu disebabkan karena masih rendahnya keinginan untuk meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga mempengaruhi hasil pelaksanaan implementasi kebijakan yang disampaikan kepada masyarakat, disamping pemahaman masyarakatnya pun yang masih beragam terhadap kebijakan program Kampung KB. Sehingga peneliti menginterpretasikan bahwa indikator badan pelaksana pada kemampuan meningkatkan kualitas pelaksana kebijakan di lini lapangan, masih rendah.

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis perasalahan tersebut di atas, peneliti memandang perlu menambahkan variabel lain sebagai alat analisis disamping alat analisis yang telah dilakukan berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn yang bisa mempengaruhi implementasi kebijakan program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Sukabumi. Variabel yang dimaksud adalah faktor motivasi dan kompetensi pegawai sebagai pelaksana kebijakan. Dengan demikian, model implementasi kebijakan yang tepat tentang prgram Kampung Keluarga Berencana oleh Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Komunikasi dan koordinasi 8 (delapan) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kinerja

KEBIJAKAN

- Perda no. 4 tahun 2016

- Surat Edaran Bupati no. 465/2045/DPPKB

- Pedoman Pelaksanaan Kampung KB

-Kemampuan Pelaksana

- Jumlah Staf

- Motivasi

- Kompetensi

Ketaatan dan Kepatuhan para pelaksana kebijakan

Sumber Dana dari APBN dan Alokasi Dana Desa

* Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat
* Pendapat dan respon masyarakat
* Dukungan tokoh elit masyarakat

Gambar 3 Model Implementasi Kebijakan yang Tepat

tentang program Kampung KB

Sumber : Hasil penelitian 2018

**5.1. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan mengenai model Implementasi Kebijakan yang tepat tentang Program Kampung Keluarga Berencana oleh Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

**5.1.1. Implementasi Kebijakan tentang Program Kampung Keluarga Berencana oleh Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi**

Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) merupakan Program pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan strategis dikelola serta dilaksanakan oleh Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut Usia pada bidang keluarga Sejahtera dan Advokasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) bekerjasama secara terpadu dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat dalam rangka pelaksanaan penguatan bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara sistemik dan sistematis. Selain itu juga dalam rangka mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019 yang didukung oleh 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), DPPKB diharapkan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan Agenda Prioritas ke 3,5, dan 8 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dan melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kurikulum pendidikan

Implementasi Kebijakan tentang Program Kampung Keluarga Berencana oleh Seksi Bina Ketahanan Keluarga bidang keluarga Sejahtera dan Advokasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sukabumi didasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021. Diperkuat dengan Surat Edaran Bupati Sukabumi nomor 465/2045/DPPKB tentang Penguatan Keberadaan Kampung Keluarga Berencana di kecamatan se-Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu dibuatlah Pedoman Pelaksanaan Program Kampung KB yang menjadi acuan teknis pelaksanaan secara menyeluruh di tingkat Dinas maupun lini lapangan.

Pada tahun 2011, Kabupaten Sukabumi telah terlebih dahulu membentuk Kampung Keluarga Kecil Berkualitas (Kampung KKB). Sampai dengan tahun 2015 telah terbentuk Kampung KKB sebanyak 130 kampung dari 26 kecamatan. Pada tahun 2016 dengan telah dicanangkannya Kampung KB secara Nasional oleh Presiden Jokowi pada tanggal 14 Januari 2016 di Cirebon, maka telah dibentuk 47 Kampung KB di wilayah Kabupaten Sukabumi.

**5.1.2. Model Implementasi Kebijakan yang tepat tentang Program Kampung Keluarga Berencana oleh Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi**

Berdasarkan hasil analisis dalam pembahasan, peneliti mengambil kesimpulan model implementasi kebijakan yang tepat tentang program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) oleh Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut Usia Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi adalah model Implementasi kebijakan yang merujuk pada konsep dan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2014 : 109), yang terdiri dari : Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan; Sumber-sumber kebijakan; Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; Karakteristik badan-badan pelaksana; Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik; Kecenderungan para pelaksana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

**5.1.2.1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan**

Berdasarkan hasil observasi dan perolehan data hasil penelitian, menyatakan bahwa faktor ukuran-ukuran dasar (standar) dan tujuan-tujuan (sasaran) kebijakan program Kampung Keluarga Berencana oleh Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut Usia Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi, telah direalisasikan. Demikian pula hasil wawancara yang dilakukan menyatakan bahwa implementasi kebijakan tentang program Kampung KB selain berdasarkan Perda nomor 04 tahun 2016, juga diterbitkan Surat Edaran Bupati tentang penguatan keberadaan kampung keluarga berencana (kampung KB) dan Pedoman Pelaksanaan Kampung KB di Kabupaten Sukabumi. Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa faktor ukuran-ukuran dasar (standar) dan tujuan-tujuan kebijakan sampai penelitian ini selesai dilakukan, sudah baik.

**5.1.2.2. Sumber-sumber kebijakan**

Faktor sumber-sumber kebijakan merupakan ketersediaan dana, untuk pembiayaan implementasi kebijakan tentang program Kampung KB di Kabupaten Sukabumi, ditunjang oleh dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Alokasi Dana Desa. Berdasarkan hasil analisis data dan observasi, optimalisasi kegiatan-kegiatan yang terintegrasi dalam program kampung KB masih memerlukan peningkatan dukungan biaya operasional mengingat cakupan wilayah kerja yang ckup luas. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa ketersediaan dana operasional pelaksanaan kampung KB sudah cukup dengan memperkecil skala kebutuhan yang ada dalam program kampung KB di setiap kecamatan. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa faktor sumber-sumber kebijakan sudah dilaksanakan cukup baik.

**5.1.2.3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan**

Faktor komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan berdasarkan hasil observasi dan data yang terdiri dari indikator-indikator sebagai berikut : Informasi program sudah jelas, akurat, dan konsisten; standar dan sasaran mudah dipahami; bantuan teknis pada bawahan diberikan sesuai skala prioritas; pimpinan sudah membantu menafsirkan peraturan; mendorong inisiatif bawahan; dan menerapkan sanksi secara persuasif. Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa ada kendala dalam faktor komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Adanya beragam pemahaman terhadap program kebijakan yang dilaksanakan sehingga terkadang memberikan tanggapan negatif karena kurang pemahaman berupa program pemberdayaan selain itu masih terdapat egoisme sektoral di antara SKPD terkait. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan faktor komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan kebijakan sudah cukup baik.

5.1.2.4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan faktor karakteristik badan-badan pelaksana kebijakan program kampung KB dengan indikator kemampuan staf; jumlah staf; dukungan SKPD dan upaya peningkatan kualitas staf. Selanjutnya peneliti menganalisis berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan data yang diperoleh menyatakan bahwa kemampuan staf/pegawai masih harus ditingkatkan lagi sesuai tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pegawai/staf petugas lapangan yang bervariasi tentunya sangat didukung oleh DPPKB Kabupaten Sukabumi sehingga sasaran program bisa tercapai. Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa faktor karakteristik badan-badan pelaksana masih kurang baik dalam hal peningkatan kualitas dan kemampuan pelaksana kebijakan.

5.1.2.5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Faktor kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik masih belum dapat dipengaruhi oleh kebijakan tentang program kampung KB. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diperoleh keterangan kondisi ekonomi masyarakat kabupaten Sukabumi masih rendah, dilihat dari angka pendapatan per kapita. Di samping itu rendahnya pemahaman dan respon dari masyarakat yang masih dirasakan lamban sehingga perlu mengadakan pembinaan intensif, dan juga motivator KB yang dapat meningkatkan perannya dalam Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat. Demikian pula berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa kondisi ekonomi, sosial dan politik pada masyarakat Kabupaten Sukabumi masih perlu peningkatan dan pembinaan dalam pemahaman program pemberdayaan tersebut. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa faktor ekonomi, sosial dan politik sudah cukup baik.

5.1.2.6. Kecenderungan para pelaksana

 Faktor kecenderungan para pelaksana kebijakan sudah cukup baik dalam mendukung implementasi kebijakan tentang Program Kampung KB. Walaupun kendala-kendala untuk meningkatkan kualitas para pelaksana masih harus terus dilakukan. Berdasarkan hasil observasi dan data, kecenderungan para pelaksana dengan indikator-indikator pengetahuan, tanggapan, kesadaran dan ketaatan para pelaksana, pada umumnya bervariasi. Namun upaya untuk meningkatkan pengetahuan para pelaksana di lapangan menjadi agenda yang harus dipersiapkan baik melalui pembinaan dan pendidikan latihan secara berkala. Demikian pula hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa kecenderungan para pelaksana, memberikan dukungan terhadap program kebijakan tentang kampung KB. Berdasarkan hasil analisis tersebut, peneliti menyimpulkan kecenderungan para pelaksana kebijakan cukup baik dalam mendukung implementasi kebijakan program kampung KB.

5.2. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut Usia Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, peneliti melihat bahwa perlu adanya suatu model implementasi kebijakan yang tepat untuk mendukung pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada Kampung KB agar keberhasilan pelaksanaan program Keluarga Berencana yang ditandai dengan peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut ber-KB dalam upaya mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas bisa tercapai. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut :

**Saran Akademik**

Hasil penelitian ini perlu dikembangkan oleh peneliti lainnya, yang tertarik pada obyek yang sama, dengan fokus kajian yang berbeda. Peneliti merekomendasikan untuk mengkaji dari sisi regulasi kebijakan yang digulirkan sampai pada teknis pelaksanaan di lapangan, koordinasi fungsional dan lintas institusional, selain menggunakan teori dan konsep yang ada dari teori Van Metter dan Van Horn, juga perlu kiranya ditambahkan konsep motivasi dan kompetensi pegawai sehingga  mendapatkan konsep, teori, dan pemahaman yang lebih komprehensif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang teritegrasi dalam Kampung KB guna mencapai tujuannya yaitu mewujudkan Keluarga Kecil Sejahtera dan Berkualitas.

Hasil penelitian ini dapat memberikan nilai tambah bagi penguatan konsep, teori dan pemahaman, dan pengembangan ilmu administrasi publik, terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik.

**Saran Praktis**

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan mengenai model implementasi yang tepat bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi dengan indikator-indikator pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang terintegrasi dalam Program Kampung Keluarga Berencana secara lebih sistemik dan sistematis sebagai salah satu bentuk upaya pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal.
2. Selain langkah-langkah yang sudah dilakukan selama ini, dapat kiranya menjadi pertimbangan Pimpinan dalam memberikan motivasi kepada pelaksana lini lapangan dalam bentuk :
3. Memberikan penghargaan kepada pelaksana yang berprestasi;
4. Mempererat kekeluargaan sesama pegawai;
5. Mengenali kekurangan dan kelebihan setiap karyawan;
6. Memberikan training karyawan secara rutin dan berkala.
7. Sebaiknya dilakukan upaya perencanaan kebutuhan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana kebijakan di lapangan yang memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam penggerakkan dan pelestarian program keluarga berencana.
8. Disarankan untuk memakai model Implementasi Kebijakan tentang program Kampung Keluarga Berencana sesuai hasil penelitian.

# DAFTAR PUSTAKA

Abdul Bari Saifuddin, dkk. 2003. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi. Jakarta : Yayasan Bina Pusaka

Affandi, B. 2006. Buku panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi. Edisi Ketiga.Cetakan Kedua. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo

Agus, Erwan dan Ratih, Dyah, 2012, Implementasi Kebijakan Publik*.* Gava Media. Yogyakarta

Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.

Alamsyah, Kamal. 2016. Kebijakan Publik, Konsep, dan Aplikasi*.* Bandung : Media Citra Mandiri Press.

Anderson, James E. 1978. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 2nd ed

Atmosudirdjo, Prajudi. 1982. Administrasi dan Manajemen Umum. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.

Danim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti kualitatif. Bandung : Pustaka Setia

Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Handayaningrat, Soewarno. 1995. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta : Gunung Agung.

Islamy, Irfan. 2014. Prnsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

Jones, Charles O. 1996. Analisis Kebijakan Negara. Jakarta : Gramedia.

Keban, Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu.Gava Media. Yogyakarta

Kencana, Inu Syafiie. 2006. Ilmu Aministrasi Publik. Jakarta : Rineka Cipta.

Koentjaraningrat. 1982. Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta : Gramedia.

Kristiadi, JB. 1994. Administrasi/Manajemen Pembangunan. LAN-RI. Jakarta.

Moekijat, 1995.Analisis Kebijakan Publik. Bandung : Mandar Maju.

Nazir,1988. Metode Penelitian.Cetakan Kelima Jakarta, Ghalia Indonesia.

Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy,* Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan. Jakarta : Elex Media Komputindo.

Parsons, Wayne. 2007. *Public Policy:* Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Prenada Media: Jakarta.

Rusli, Budiman. 2013. Kebijakan Publik. Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*.* Bandung: Hakim Publishing.

Satibi, Iwan. 2011. Teknik Penelitian Skripsi, Tesis, dan Disertasi*.* Bandung : CEPLAS.

Siagian, Sondang P. 1989. Filsafat Aministrasi. Jakarta : Haji Masagung.

Silalahi, Ulbert. 2013.Studi tentang Ilmu Administrasi, Konsep, Teori dan Dimensi. Bandung : Sinar Baru Algesindo.

Sitorus, Monang, 1984, Teori Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Bandung: Unpad Press.

Subarsono, AG. 2010. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2005. Metoda Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta.

Sukmadinata, 2006. Metode Penelitian Pendidikan*.* Bandung Re:maja Rosdakarya.

Thoha, Miftah. 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta : Prenadamedia.

Tachjan, 2008. Implementasi Kebijakan Publik*.* Bandung : Asosiasi Ilmu Politik

Indonesia (AIPI) dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.

Wahab, solihin Abdul. 2017.Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta : CAPS.

##  PERATURAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2004 tentang Penyerahan sebagian urusan di bidang Keluarga Berencana kepada pemerintah Kabupaten dan Kota.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi (RPJMD) tahun 2010-2015.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi (RPJMD) tahun 2016-2021.

Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 59 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 843.4/20/Yanbangsos tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Barat.

Surat Edaran Bupati Sukabumi Nomor 465/2045/DPPKB tentang Penguatan Keberadaan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Sukabumi.